Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto

Jesica Febrila Taha[1], Muh. Firyal Akbar[2], Sri Lestari Gintulangi[3], [4]Widya Kurniati Mohi
[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Article Info

Article history:

Infrastructure Development, Lake Limboto, Policy, accuracy, distribution, responsiveness, efficiency, and effectiveness

Keywords:

First keyword

Second keyword

Third keyword

Fourth keyword

Fifth keyword

ABSTRACT

Kebijakan pembangunan infrastruktur merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Proses ini melibatkan analisis mendalam mengenai apakah tujuan kebijakan telah tercapai, apakah sumber daya yang digunakan telah dioptimalkan, dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai aspek, seperti kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta perkembangan ekonomi daerah. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Kurangnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait dan untuk mengidentifikasi keterlibatan partisipasi masyarakat disekitar danau Limboto. Desain penelitian Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Sampel sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Informan yang akan digunakan seperti Pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS), Dan Masyarakat Lokal yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kebijakan ini belum mencapai tujuan yang diharapkan, dengan tantangan utama seperti ketidaktepatan kebijakan, pemerataan manfaat yang belum optimal, serta rendahnya responsivitas, efisiensi, dan efektivitas implementasi. Kesimpulan Kebijakan pembangunan di Danau Limboto menunjukkan progres, namun masih menghadapi tantangan dalam koordinasi, implementasi, dan pemerataan manfaat, sehingga perlu peningkatan pada indikator efektivitas dan responsivitas. Saran Pemerintah perlu meningkatkan ketepatan, pemerataan, responsivitas, efisiensi, dan efektivitas kebijakan dengan fokus pada area kritis, koordinasi, serta pengawasan optimal masyarakat.

Article Info

Article history:

Diterima: Tanggal, Bulan, Tahun

Terbit: Tanggal, Bulan, Tahun

Abstract

Infrastructure development policy is a systematic process to assess the extent of effectiveness, efficiency, and impact of policies implemented in infrastructure development and management. This process involves an in-depth analysis of whether policy objectives have been achieved, whether the resources used have been optimized, and how the policy affects various aspects, such as community welfare, environmental sustainability, and regional economic development. The purpose of the study was to identify the lack of policy synchronization and coordination between related institutions and to identify the involvement of community participation around Limboto Lake. Research design: This qualitative study uses a descriptive research design. The sample of data sources used in qualitative research is still temporary. Informants to be used such as the Regional Government, River Basin Center (BWS), and Local Communities who participated in this study. The results of the study indicate that the development policy in Limboto Lake shows progress, but still faces challenges such as increasing responsiveness and coordination between stakeholders, weak coordination, long bureaucracy, and minimal supervision. Although the adequacy and accuracy of the policy are quite fulfilled, the implementation is not optimal, especially in the distribution of benefits and ecosystem protection.

Conclusion: The development policy in Lake Limboto shows progress, but still faces challenges in coordination, implementation, and distribution of benefits, so it is necessary to improve the effectiveness and responsiveness indicators. Suggestions: the government needs to improve the accuracy, distribution, responsiveness, efficiency, and effectiveness of the policy by focusing on critical areas, coordination, and optimal communication.

This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Corresponding Author:

Jesica

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: jesicafebrila15@gmail.com

1. PENDAHULUAN (12 Pt)

1.1 Latar Belakang

Danau merupakan salah satu ekosistem penting yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sebagai sumber air, habitat flora dan fauna, serta penunjang aktivitas manusia seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, keberadaan danau sangatlah vital. Namun, berbagai danau di Indonesia, termasuk Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, menghadapi ancaman serius akibat pencemaran, sedimentasi, dan penyempitan area. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, Danau Limboto masuk dalam kategori danau kritis dengan luas yang terus menyusut, dari 7.000 hektar pada tahun 1932 menjadi hanya sekitar 2.500 hektar dalam beberapa dekade terakhir [1].

Pembangunan infrastruktur di sekitar Danau Limboto, seperti jalan, jembatan, dan pemukiman, yang tidak terencana dengan baik telah mempercepat sedimentasi dan degradasi ekosistem. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sedimentasi meningkat hingga 30% dalam lima tahun terakhir akibat aktivitas pembangunan yang mengabaikan tata kelola lingkungan [2]. Sementara itu, kebijakan pembangunan infrastruktur yang diterapkan sering kali kurang mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, sehingga justru memperburuk kondisi ekosistem danau [3].

Ayat dalam Surah Al-Baqarah (2:205) mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan moral ini, evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Danau Limboto menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem lebih lanjut.

1.2 Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah utama yang perlu diteliti lebih lanjut:

1. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga terkait, meskipun sudah ada regulasi formal seperti Perda Gorontalo No. 1 Tahun 2008.
2. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur di sekitar Danau Limboto.
3. Keterbatasan anggaran dan data yang tidak memadai sebagai dasar pengambilan kebijakan.

1.3 Literatur yang Relevan

Penelitian terdahulu telah membahas dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekosistem danau, seperti yang dilakukan oleh Wiryawan (2022) tentang Danau Maninjau dan Kurniawati (2022) mengenai konservasi berbasis masyarakat di Danau Poso [4]. Namun, belum ada penelitian yang secara

komprehensif mengevaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto, khususnya dari perspektif koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat.

1.4 Pendekatan dan Solusi yang Diusulkan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi kebijakan dan mencari solusi yang melibatkan koordinasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat.

1.5 Inovasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan:

1. Mengembangkan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan Danau Limboto.
2. Menawarkan model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Memanfaatkan kerangka teori evaluasi kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan.

2. METODE PENELITIAN (12 Pt)

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitratif jenis deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 1 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 1 orang, Balai Wilayah Sungai (BWS) 1 orang, Masyarakat sekitar danau limboto 3 orang. Sedangkan sumber data sekunder yang menjadi rujukan peneliti adalah semua dokumen yang dapat melengkapi hasil penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan adalah wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 1 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 1 orang, Balai Wilayah Sungai (BWS) 1 orang, Masyarakat sekitar danau limboto 3 orang.

Lokasi penelitian di laksanakan di danau limboto Kabupaten Gorontalo dengan kurun waktu 1 bulan. Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang penelitian. Analisis keabsahan data dilakukan mulai tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan dijelaskan melalui berbagai representasi data seperti tabel, grafik, dan gambar untuk memudahkan pemahaman pembaca. Data yang dikumpulkan meliputi evaluasi kebijakan pengelolaan Danau Limboto, efektivitas pembangunan infrastruktur, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Berikut adalah temuan utama penelitian:

- **Kondisi Ekosistem Danau Limboto:** Sedimentasi meningkat hingga 30% dalam lima tahun terakhir, menyebabkan penurunan kapasitas danau sebagai penampung air [2].
- **Efektivitas Kebijakan:** Koordinasi antar lembaga belum optimal, mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur [3].
- **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih sangat minim, yang memengaruhi penerimaan dan keberlanjutan kebijakan [4].

3.2. Pembahasan

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas

berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. (Dunn, 2003).

Efektivitas merupakan kata yang berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif artinya manjur, mujarab, efisien, mampu membawa keberhasilan dan bermanfaat (Kusumaningtyas,v 2023). Selanjutnya pendapat Menurut Beni (2016), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga dikatakan sebagai ukuran sejauh mana tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu lternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari tindakan yang diambil.

Efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa capaian positif, implementasinya masih jauh dari optimal. Kebijakan ini bertujuan mengatasi pendangkalan, mengurangi risiko banjir, dan memulihkan ekosistem, dengan langkah konkret seperti pembangunan tanggul, penghijauan sempadan, dan penertiban aktivitas di zona sempadan. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Gorontalo No. 1 Tahun 2008, program-program tersebut telah berjalan, namun tantangan di lapangan menghambat pencapaian tujuan secara keseluruhan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Gorontalo, Bappeda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Koordinasi yang tidak terintegrasi mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan program yang berjalan sektoral tanpa sinkronisasi.

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto telah menunjukkan progres, namun masih jauh dari optimal. Hambatan utama, seperti koordinasi yang lemah, partisipasi masyarakat yang rendah, dan minimnya pengawasan, harus segera diatasi melalui pendekatan kolaboratif antar lembaga dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan membutuhkan sinergi lintas sektor yang lebih kuat serta dukungan anggaran dan pengawasan yang konsisten.

Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya, dan bahan) seminimal mungkin, namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Dengan kata lain, efisiensi berkaitan dengan bagaimana sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang paling hemat dan tepat guna.

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil (Dunn, 2003).

Menurut Mukhtisar, (2021) Efisiensi adalah ketetapan cara (usaha, kerja) dan menjalankan suatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Selanjutnya pendapat Menurut Winarno (2008), efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, di mana usaha biasanya diukur dalam bentuk biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk

atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dianggap efisien.

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur. Efisiensi kebijakan pembangunan sempadan Danau Limboto masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kendala utama meliputi keterlambatan pencairan dana, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, proses birokrasi yang panjang, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Meskipun alokasi anggaran telah disediakan, keterlambatan dalam proses administrasi memperlambat pelaksanaan proyek, yang berdampak pada pengerjaan fisik seperti pengerukan dan penghijauan sempadan.

Kecukupan

Menurut teori William N. Dunn, merujuk pada sejauh mana kebijakan publik mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan utama kebijakan tersebut. Dalam konteks pembangunan sempadan Danau Limboto, kecukupan kebijakan dapat dinilai dari efektivitasnya dalam mengatasi masalah utama seperti sedimentasi, kerusakan ekosistem, dan pengendalian aktivitas manusia di sekitar danau. Saat ini, kebijakan pembangunan sempadan belum sepenuhnya mencukupi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang membuat pembangunan sempadan tidak merata di seluruh area prioritas. Selain itu, sedimentasi yang tetap tinggi menunjukkan bahwa langkah-langkah teknis, seperti pembangunan tanggul penahan erosi dan penanaman vegetasi, masih belum mampu mengurangi dampak negatif secara signifikan.

Menurut pendapat (Zakrin, 2022) Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus ditangani. Seperti yang disampaikan oleh pejabat Dinas PUPR, keterbatasan ini menyebabkan pembangunan sempadan tidak merata di seluruh area prioritas. Proyek pembangunan, seperti tanggul penahan erosi dan penanaman vegetasi, meskipun telah dilaksanakan, belum mampu secara signifikan mengurangi sedimentasi yang terus terjadi. Selain itu, relokasi masyarakat di sekitar sempadan memerlukan pendekatan yang lebih intensif untuk mendorong penerimaan kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur. Bahwa Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan sempadan Danau Limboto merupakan langkah penting dalam upaya melindungi ekosistem danau. Namun, kecukupannya dalam menyelesaikan masalah utama masih terbatas akibat keterbatasan anggaran, koordinasi yang belum optimal, dan resistensi masyarakat. Untuk meningkatkan kecukupan kebijakan ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pengelolaan kawasan hulu, penambahan anggaran, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat secara aktif.

Pemerataan

Teori William N. Dunn mengenai pemerataan (equity) menekankan bahwa kebijakan publik harus memastikan distribusi manfaat dan beban secara adil di seluruh kelompok masyarakat yang terkena dampak. Dalam konteks pembangunan sempadan Danau Limboto, evaluasi pemerataan kebijakan ini melibatkan analisis bagaimana manfaat pembangunan sempadan, seperti perlindungan lingkungan, pencegahan sedimentasi, dan pengelolaan sumber

daya air, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di sekitar danau, termasuk kelompok yang rentan.

Menurut pendapat (Zakirin, 2022). Pemerataan, Bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Pemerataan (equity) dalam konteks kebijakan pembangunan sempadan Danau Limboto, sebagaimana dijelaskan oleh William N. Dunn, menuntut distribusi manfaat dan beban secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat yang terdampak. Berdasarkan hasil penelitian, tantangan utama dalam memastikan pemerataan ini meliputi keterbatasan anggaran, pelaksanaan yang bertahap, serta resistensi masyarakat terhadap program seperti relokasi.

Dinas PUPR menjelaskan bahwa pembangunan sempadan difokuskan pada area yang mengalami erosi berat dan dampak lingkungan paling besar. Namun, wilayah terpencil di sekitar Danau Limboto belum menjadi prioritas utama, sehingga manfaat kebijakan ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Tantangan serupa juga muncul dalam proses relokasi masyarakat, di mana penawaran solusi berupa lahan pengganti atau kompensasi sering kali tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur. Bahwa sejumlah tantangan dalam mewujudkan pemerataan tersebut. Keterbatasan anggaran dan pelaksanaan program yang bertahap menjadi kendala utama, selain adanya resistensi masyarakat terhadap program relokasi. Pembangunan lebih difokuskan pada wilayah yang mengalami erosi berat dan dampak lingkungan terbesar, sehingga wilayah terpencil di sekitar Danau Limboto belum menjadi prioritas dan belum merasakan manfaat secara menyeluruh. Proses relokasi pun terkendala karena solusi kompensasi atau lahan pengganti yang ditawarkan sering tidak diterima masyarakat.

Responsifitas

Menurut teori William N. Dunn, merujuk pada sejauh mana kebijakan publik mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur sempadan Danau Limboto, responsivitas dapat dievaluasi dari kemampuan kebijakan ini untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan ekosistem danau sekaligus menangani dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sempadan.

Menurut pendapat (Zakirin, 2022). Responsivitas, keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif beruapa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya

Saat ini, pembangunan sempadan Danau Limboto menunjukkan tingkat responsivitas yang masih terbatas. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk mengatasi masalah sedimentasi, erosi, dan degradasi lingkungan, pelaksanaannya sering kali kurang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, relokasi warga yang tinggal di kawasan sempadan sering kali dilakukan tanpa dialog yang memadai, sehingga menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan mata pencaharian alternatif juga belum sepenuhnya direspons oleh kebijakan ini, mengingat sebagian besar warga sekitar danau bergantung pada aktivitas ekonomi yang dilakukan di area sempadan.

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur. Bahwa responsivitas kebijakan publik diukur dari kemampuannya merespons kebutuhan, aspirasi, dan masalah masyarakat yang

menjadi sasaran kebijakan. Dalam kasus pembangunan sempadan Danau Limboto, kebijakan ini dirancang untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang mendesak, seperti sedimentasi, erosi, dan degradasi ekosistem. Dari sisi ini, kebijakan telah menunjukkan tingkat responsivitas yang baik terhadap tantangan ekologi di sekitar danau. Namun, aspek sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan ini sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan di lapangan.

Ketepatan

Ketepatan (appropriateness) dalam teori William N. Dunn merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab masalah utama yang dihadapi masyarakat atau lingkungan secara spesifik dan relevan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur sempadan Danau Limboto, evaluasi ketepatan kebijakan ini dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut merespons masalah krusial seperti degradasi ekosistem, sedimentasi, dan penyempitan danau.

Menurut pendapat (Zakirin, 2022). Ketepatan, adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak

Kebijakan pembangunan sempadan Danau Limboto secara prinsip tepat sasaran karena bertujuan untuk mengatasi permasalahan utama yang mengancam keberlanjutan ekosistem danau. Langkah-langkah seperti penguatan batas sempadan, pencegahan aktivitas ilegal di area sempadan, dan upaya pengendalian sedimentasi menunjukkan relevansi kebijakan dengan kebutuhan lingkungan. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi tantangan yang dapat mengurangi ketepatan tujuan. Misalnya, prioritas pembangunan yang terkadang lebih fokus pada area strategis secara ekonomi daripada area yang paling rusak secara ekologi mengurangi efektivitas kebijakan ini.

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur. Bahwa ketiga lembaga yang terlibat sepakat bahwa kebijakan pembangunan sempadan Danau Limboto sudah tepat dalam prinsipnya untuk melindungi ekosistem danau. Namun, tantangan utama terletak pada pemetaan wilayah prioritas, dampak sosial terhadap masyarakat, dan koordinasi lintas lembaga. Untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, disarankan adanya peningkatan koordinasi antar-lembaga, penggunaan teknologi pemetaan yang lebih akurat, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan Perda Gorontalo No. 1 Tahun 2008 belum tercapai karena evaluasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait masih kurang efektif, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan sempadan dan aturan pemanfaatannya, implementasi Perda pun belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan antar pihak yang terlibat. Evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Dunn (2003) juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Danau Limboto belum mencapai tujuan yang diharapkan, dengan rendahnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan akibat kendala seperti koordinasi yang lemah, birokrasi panjang, serta implementasi yang belum merata, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat sekitar Danau Limboto dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih tergolong rendah, yang mencerminkan bahwa upaya pelibatan masyarakat belum berhasil dijalankan secara optimal.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan dokumen ini:

1. **Allah SWT** atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai penulis dalam setiap langkah.
2. **Kedua orang tua dan keluarga** yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti.
3. **Dosen pembimbing** atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah dibagikan selama proses penyelesaian penelitian ini.
4. **Rekan-rekan mahasiswa** yang telah memberikan inspirasi dan semangat.
5. **Seluruh pihak terkait**, termasuk informan dan lembaga yang berkontribusi memberikan data dan informasi penting untuk mendukung penelitian ini.

Semoga kontribusi dari semua pihak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta menjadi langkah awal untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

6. DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. (2018). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Dikutip dalam Sudiro, halaman 63). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kusumaningtyas, P. (2023, November). Efektivitas Pemanfaatan Chat GPT dalam Tugas Esai Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 2, pp. 158-165).

Mukhtisar, (2021). Pengaruh Efisiensi, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng Banda Aceh). Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 56-72.

Putra, A., & Dewi, K. (2023). Penerapan Teknologi Hijau dalam Pengelolaan Infrastruktur di Danau Limboto: Studi Kasus Pembangunan Drainase Berkelanjutan. Jurnal Teknik Lingkungan, 9(2), 180-190.

Widodo, S., & Lestari, P. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur di Danau Limboto: Sebuah Pendekatan Partisipatif. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 99-109.

William N. Dunn (2003) Indikator Evaluasi KebijakanJurnal Kebijakan Publik, 7(1), 45-56.

Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Japb, 5(1), 256-271.